



CSIS COMMENTARIES

CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. This commentaries serves as a medium for experts to disseminate knowledge and share perspectives in two languages – Bahasa Indonesia and English, enabling a diverse readership to engage with the content. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia. Please contact the editorial team for any enquiries at publication@csis.or.id

CSIS Commentaries CSISCOM01425

September 26th, 2025

Demonstrasi dan Tuntutan Keadilan: Menyulam Ulang Ruang Publik

D. Nicky Fahrizal

Peneliti, Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS Indonesia

Azriel Rizky Meviano

Project Research Assistant, Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS Indonesia

Revo Linggar Vandito

Project Research Assistant, Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS Indonesia

Demonstrasi 25, 28, dan 29 Agustus 2025 memperlihatkan kapasitas masyarakat sipil untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit menghadapi tekanan: himpitan ekonomi, penyempitan ruang publik hingga inkonsistensi hukum. Di tengah situasi itu justru tumbuh ketahanan sipil yang melahirkan aksi kolektif serentak. Makna fundamental dari rangkaian protes ini jelas: aksi sipil yang muncul bukan sekadar reaksi spontan, melainkan manifestasi hidupnya demokrasi dan solidaritas warga. Masyarakat tidak hanya bertahan, tetapi juga melawan ketidakadilan secara sadar, aktif, dan terorganisir.

Awal Agustus bahkan ditandai “ironi digital”: seruan di media sosial untuk mengibarkan bendera bajak laut *One Piece*.¹ Simbol Jolly Roger dipinjam sebagai tanda penolakan terhadap ketidakadilan. Fenomena organik ini menunjukkan bagaimana budaya pop digunakan publik untuk menyuarakan keresahan. Kisah Luffy dan kru Topi Jerami yang sarat kritik sosial dipandang paralel dengan situasi Indonesia hari ini—pesan bahwa rakyat sedang mencari jalannya sendiri untuk menolak dominasi dan elitisme.

Tak hanya itu, sekitar 13 Agustus, Kabupaten Pati diguncang unjuk rasa besar-besaran menentang kebijakan Bupati Sudewo menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen.² Alih-alih di masa “bulan madu,” kepala daerah justru kehilangan kepercayaan publik. Seruan lengser mengemuka, menandakan putusnya kontrak sosial. Kasus Pati memperingatkan: rakyat bukan anti-pajak, melainkan anti pada kebijakan yang tidak adil. Jika suara publik diabaikan, stabilitas politik dan pembangunan di daerah akan terancam.

Dua rangkaian peristiwa ini menyingkap hal pokok: lahirnya aksi yang kreatif, subversif, namun penuh makna; sekaligus kekecewaan mendalam terhadap pola kepemimpinan yang gagal berkomunikasi dengan rakyat. Kesimpulannya tegas: ketahanan sipil adalah syarat utama bagi aksi sipil yang efektif.

Jalanan Bicara: Lonceng Peringatan bagi Kepemimpinan Prabowo

Gelombang protes 25 Agustus 2025 di Jakarta menandai titik balik eskalasi reaksi publik terhadap lembaga politik. Ribuan massa lintas latar belakang—mahasiswa, pelajar, buruh, pedagang, hingga pengemudi ojek daring—membanjiri kawasan DPR/MPR, Monas, Palmerah, dan Slipi. Pesannya tegas: politik yang abai pada kepentingan rakyat digugat di jalanan.

Aksi berlangsung tanpa komando terpusat, massa bergerak secara acak di berbagai titik.³ Pemicu utamanya adalah kebijakan tunjangan perumahan DPR Rp50 juta per bulan, kontras dengan realitas rakyat yang dihimpit biaya hidup tinggi dan upah minimum stagnan. Di mata publik, kebijakan ini menjadi simbol ketidakadilan sosial sekaligus bukti keterputusan elite dari rakyat. Tak heran, tuntutan yang muncul melebar: dari penolakan tunjangan, seruan pembubaran DPR, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga penolakan oligarki, dinasti politik, dan komersialisasi pendidikan.

Karakter aksi 25 Agustus jelas: pluralitas tuntutan dan keterhubungan simbolik, di mana berbagai isu bermuara ke DPR yang kini diposisikan sebagai “musuh bersama”—simbol krisis representasi politik. Namun respons aparat justru mempertebal delegitimasi: gas air

¹ BBC News Indonesia, “Seruan Mengibarkan Bendera One Piece – Kenapa Budaya Pop Kerap ‘dipinjam’ Sebagai Simbol Protes?,” August 2, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62766edyx9o>.

² BBC News Indonesia, “Ribuan Warga Pati Tuntut Bupati Mundur, Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah?,” August 13, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ejd9vjv1wo>.

³ Salam, Hidayat. “Aparat Bubarkan Paksa Massa Pengunjuk Rasa Tolak Tunjangan Perumahan Anggota DPR.” Kompas.id, August 25, 2025. https://www.kompas.id/artikel/aparat-bubarkan-paksa-massa-pengunjuk-rasa-tolak-tunjangan-perumahan-anggota-dpr?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic.

mata dan water cannon bukan hanya memicu kericuhan, tetapi menegaskan watak represif negara. Ruang protes damai makin sempit, sementara kanal institusional kehilangan kepercayaan publik.

Dari kaca mata demokrasi, 25 Agustus menandai pergeseran: protes tak lagi monopoli mahasiswa atau kelompok terorganisir, melainkan akumulasi keresahan lintas kelas. Seruan “bubarkan DPR” menunjukkan rapuhnya kontrak sosial rakyat-wakil. Jika dibiarkan tanpa respons substantif, gelombang serupa bisa tumbuh menjadi embrio aksi sipil yang lebih besar dan berkelanjutan.



Gambar 1.1 Intensitas Aksi Sipil Periode Januari-Agustus 2025 (Data Diolah Peneliti)⁴

Berdasarkan data yang dihimpun dari 151 berita nasional terkait aksi sipil di seluruh Indonesia, sebaran demonstrasi Januari–Agustus 2025 juga menunjukkan pola nasional. Jawa menjadi episentrum karena kepadatan penduduk dan dominasi gerakan mahasiswa, buruh, serta ojek daring. Papua dipicu kekecewaan infrastruktur, termasuk penolakan program Makan Siang Bergizi Gratis. Maluku mencatat riuh gerakan sipil terbesar, dipicu tambang dan jalan raya. Sulawesi, terutama Tenggara, digerakkan oleh protes buruh dan eksploitasi sumber daya alam. Pola ini menegaskan 2025 sebagai tahun aksi sipil: rakyat menjadikan demonstrasi sebagai kanal utama menolak kebijakan yang dinilai tak berpihak dan justru memperlebar ketimpangan.

Jika 25 Agustus mencerminkan ledakan spontan keresahan publik, maka 28 Agustus memperlihatkan eskalasi lebih terstruktur melalui gerakan buruh. Ribuan pekerja dari Partai Buruh, KSPI, dan serikat turun ke jalan dengan agenda nasional tegas: hapus outsourcing, tolak upah murah, hentikan PHK, serta sahkan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan

⁴ Data primer penelitian ini dihimpun dari 151 berita nasional terkait aksi sipil di seluruh Indonesia

Aset tanpa omnibus law. Narasi “Hostum” (*Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah*) muncul sebagai simbol aksi terhadap kebijakan ekonomi yang menekan pekerja.⁵

Berbeda dengan 25 Agustus yang sporadis, aksi buruh 28 Agustus menunjukkan organisasi, struktur, dan koordinasi jelas. Bahkan DPR RI memberlakukan *work from home* bagi staf sebagai antisipasi. Ini menegaskan menguatnya daya tawar politik buruh sebagai aktor penting demokrasi.⁶

Namun tragedi merenggut ruang demokrasi. Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring 21 tahun, tewas dilindas kendaraan taktis polisi. Kematian Affan menjelma simbol perlawanan atas penindasan rakyat. Gerakan pun bergeser, dari isu ketenagakerjaan menuju kritik tata kelola negara, kesenjangan sosial, dan erosi kebebasan sipil. Solidaritas lintas kelompok menguat, disertai tuntutan pencopotan Kapolri dan reformasi total kepolisian.⁷

Pasca demonstrasi buruh usai siang hari, aksi berlanjut dalam pola tanpa komando, diwarnai partisipasi mahasiswa, pelajar SMK, hingga ojek daring. Konteks aksi 28 Agustus kian kompleks dengan kehadiran kelompok tak terkoordinasi yang dituding merusak fasilitas umum dan bentrok dengan aparat.⁸

Aksi 28 Agustus akhirnya menampilkan dua wajah oposisi sipil: di satu sisi gerakan buruh yang terorganisir, di sisi lain keresahan publik yang meluas, diperkuat simbol martir namun rawan terkooptasi kekerasan.

Dari kedua aksi, ada tiga pelajaran utama. Pertama, evolusi aksi sipil: dari spontanitas menuju konsolidasi. Kedua, kekuatan simbol dan martir dalam memperluas solidaritas. Ketiga, kerentanan gerakan sipil terhadap provokasi dan stigma negara. Pelajaran pentingnya: oposisi sipil hanya akan efektif bila mampu menjaga legitimasi aksi damai dengan strategi non-kekerasan sebagai landasan.

Dari Panggung Aksi ke Jalan Moral: Polisi, Warga, dan Etika Sipil

Secara hakikat, perlawanan sipil adalah aksi kolektif untuk menggugat status quo politik, sosial, maupun ekonomi tanpa mengandalkan kekerasan. Ia terorganisir, terbuka, dan secara sadar menolak penggunaan kekerasan, baik dalam cara maupun tujuan. Lebih jauh, perlawanan sipil adalah metode konflik aktif di mana warga tanpa senjata menggunakan

⁵ Nugroho, Novali Panji, and Devy Ernis. “Sederet Fakta Demo 28 Agustus Di DPR: Isi Tuntutan Buruh Hingga Larang Anarko Ganggu Aksi.” *Tempo*, August 27, 2025. <https://www.tempo.co/politik/sederet-fakta-demo-28-agustus-di-dpr-isi-tuntutan-buruh-hingga-larang-anarko-ganggu-aksi-2063815>.

⁶ Abdurrahman, Sultan. “August 28 Labor Protest: DPR Orders Employees to Work from Home.” *Tempo*. TEMPO.CO. August 28, 2025. <https://en.tempo.co/read/2043839/august-28-labor-protest-dpr-orders-employees-to-work-from-home>.

⁷ BBC News Indonesia. “Brimbob: Pengemudi Ojol Affan Kurniawan Disebut ‘martir Demokrasi’ – Apakah Aksi Massa Bakal Membesar?,” August 29, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62ny39eelgo>.

⁸ CNN Indonesia. “Polda Metro: Kelompok Ricuh Demo 28 Agustus Tanpa Koordinator Lapangan.” August 28, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250828213727-20-1267626/polda-metro-kelompok-ricuh-demo-28-agustus-tanpa-koordinator-lapangan>.

beragam cara non-institusional—pemogokan, demonstrasi, boikot, pendirian institusi alternatif, dan taktik lain—untuk mendorong perubahan tanpa melukai atau mengancam lawan.⁹

Akan tetapi, gelombang kerusuhan di akhir Agustus 2025 menunjukkan transformasi gerakan sipil dari “active non-violence” menjadi *civil unrest* yang meluas dan tak terkendali. Dampaknya nyata: pasca-demonstrasi 30–31 Agustus, tercatat 22 halte Transjakarta rusak, enam di antaranya dibakar dan dijarah. Aksi massa memperlihatkan kapasitas mobilisasi besar, sekaligus lemahnya mitigasi keamanan.

Situasi memanas pada 30 Agustus ketika kemarahan publik diarahkan ke simbol-simbol politik dan kekuasaan. Rumah pribadi anggota DPR Ahmad Sahroni di Tanjung Priok dijarah menyusul pernyataan kontroversialnya. Malam yang sama, kediaman Eko Patrio dan Uya Kuya di Jakarta serta rumah mantan suami Nafa Urbach di Tangerang Selatan turut diserang. Penjarahan yang melibatkan perusakan aset pribadi, pencurian barang berharga, hingga penghancuran kendaraan mewah.

Kemarahan kolektif tak lagi terbatas pada ruang protes, tetapi bergeser menjadi tindakan destruktif. Eskalasi juga meluas ke luar Jakarta: Gedung Negara Grahadi di Surabaya dibakar pada 30 Agustus, dengan ribuan massa menjarah berkas dan perabotan dari dalam gedung. Sehari berselang, 31 Agustus, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro ikut dijarah dalam dua gelombang massa.

Rentetan peristiwa ini menandai titik balik: dari gerakan sipil yang damai menuju ledakan amarah yang merusak, memperlihatkan rapuhnya kanal demokrasi sekaligus dangkalnya mitigasi negara dalam meredam krisis.

Melalui pengamatan yang lebih dalam, kerusuhan dan penjarahan pasca-demonstrasi memperlihatkan perubahan signifikan. Gerakan *civil resistance* yang awalnya berlandaskan disiplin non-kekerasan bertransformasi menjadi fenomena *civil unrest*.

Civil unrest adalah fenomena sosial-politik yang ditandai pecahnya keteraturan publik, meningkatnya tindak kekerasan, serta meluasnya aksi destruktif yang kerap lepas dari kendali aktor-aktor penggerak awal. Jika *civil resistance* masih memiliki legitimasi moral karena berpijak pada aksi damai, maka *civil unrest* lebih dekat pada chaos, anarki, dan hilangnya arah gerakan itu sendiri.

Donald Horowitz mencatat, kerusuhan sipil sering menjadi wadah kemarahan kolektif yang bercampur dengan kepentingan oportunistik, sehingga sulit dibedakan antara tindakan politik dan kriminalitas massa¹⁰. Gejala ini terlihat jelas dalam gelombang akhir Agustus 2025: protes politik yang semula menargetkan kebijakan dan simbol negara, bergeser menjadi serangan terhadap properti publik maupun pribadi.

Dengan demikian, pergeseran dari *civil resistance* ke *civil unrest* bukan sekadar perubahan metode, melainkan juga perubahan esensi: dari upaya menegosiasikan perubahan politik,

⁹ Erica Chenoweth, “*Civil resistance: What everyone needs to know*”, (Oxford University Press, 2021)

¹⁰ Daniel L Horowitz, “*The Deadly Ethnic Riot*” (University of California Press, 2001)

menjadi ekspresi kemarahan sosial yang destruktif. Pergeseran ini berisiko memperlebar jurang antara masyarakat, negara, dan elite politik, bahkan menciptakan disorientasi gerakan—ketika rakyat justru berhadapan dengan rakyat sendiri akibat perusakan fasilitas publik maupun properti pribadi.

Di sisi lain, perhatian khusus perlu diarahkan pada aparat kepolisian dan cara mereka menangani kerusuhan sipil. Alih-alih meredam ketegangan, respons represif justru memperkuat kesan bahwa negara cenderung abai terhadap aspirasi rakyat.

Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, hanyalah satu dari ratusan catatan hitam represifitas aparat dalam unjuk rasa. Kontras bahkan mendokumentasikan beragam bentuk kekerasan kepolisian dalam periode Juni 2024 hingga Juni 2025—potret buram relasi negara dan warga yang seharusnya dilindungi. Data Juni 2024–Juni 2025 mencatat, 60 persen kasus kekerasan polisi terhadap masyarakat berupa penembakan, disusul penganiayaan (12 persen), penangkapan sewenang-wenang (10 persen), dan pembubaran paksa aksi (6 persen). Sisanya, meski lebih kecil secara persentase, tetap menegaskan wajah represif aparat: penyiksaan, intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan seksual.

Tragedi Affan Kurniawan, bersama korban-korban lain seperti Gamma, mencerminkan represi negara yang jauh dari wajah demokrasi. Mengacu pada parameter para ahli, intensitas represi sangat dipengaruhi tipe rezim¹¹. Negara yang mengklaim diri demokratis semestinya memiliki kecenderungan lebih kecil melanggar HAM dibanding rezim otoritarian¹². Namun kasus-kasus kekerasan aparat di Indonesia justru menunjukkan sebaliknya: bukannya terkonsolidasi sebagai demokrasi, negara semakin menampilkan ciri otoritarian, menggunakan represi sebagai instrumen utama untuk mengelola gerakan masyarakat sipil yang sejatinya “non-violence.”

Selain memperlihatkan gejala otoritarianisme melalui cara aparat mengelola demonstrasi, hal lain yang patut dicermati adalah politik anggaran negara sejak 2023. Belanja Kepolisian Republik Indonesia terus meningkat: dari Rp119,852 miliar pada 2023, naik menjadi Rp 136,563 miliar di 2024, sedikit naik ke Rp138,563 miliar di 2025, dan melonjak tajam dalam RAPBN 2026 menjadi Rp145,650 miliar.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa anggaran kepolisian belum secara efisien diarahkan untuk memperkuat perlindungan rakyat, melainkan memperbesar kapasitas kontrol negara atas rakyatnya sendiri. Politik anggaran ini menegaskan kecenderungan Indonesia bergerak menuju otoritarianisme. Hal ini sejalan dengan analisis Tannenber, represi adalah instrumen fundamental dalam konsolidasi rezim otoriter, dipakai untuk menjaga otoritas negara secara paksa, kerap dibungkus dalih “stabilitas.” Dalam konteks Indonesia hari ini, lonjakan anggaran kepolisian menjadi indikator jelas bahwa negara lebih memilih memperkuat aparatus represi ketimbang merespons tuntutan publik.¹³

¹¹ Erica Chenoweth, Evan Perkoski, Sooyeon Kang, “State Repression and Nonviolent Resistance” *Journal of Conflict Resolution* Vol 61 No. 2

¹² Christian Davenport & Dave Armstrong “*Democracy and the violation of human rights: A statistical analysis from 1976 to 1996*” *American Journal of Political Science* Volume 48 No.3

¹³ Dag Tannenber “The politics of repression under authoritarian rule” (Springer, 2021)

Pertanyaannya, apa refleksi penting yang bisa kita ambil? Pertama, memahami logika perlawanan sipil menjadi kunci kesuksesan. Mobilisasi non-kekerasan bekerja melalui legitimasi: rezim bertahan bukan hanya karena kekerasan, melainkan karena masih ada pengakuan dan kepatuhan publik. Begitu legitimasi itu runtuh, kemampuan rezim untuk memerintah melemah karena masyarakat tidak lagi melihat kepatuhan sebagai sesuatu yang bernilai. Dari sini ada pesan penting: kekuasaan tidak pernah permanen; ia berdiri di atas “piramida dukungan.” Aksi non-kekerasan menargetkan pilar-pilar penopang rezim—dengan mencabut dukungan mereka, maka sejatinya perlawanan sipil bisa mengikis bahkan meruntuhkan sistem yang menindas.¹⁴

Kedua, pergeseran dari *civil resistance* ke *civil unrest* mengubah logika perlawanan itu sendiri. Alih-alih memperkuat strategi non-kekerasan, perlawanan yang bergeser ke arah chaos dan anarki yang justru kehilangan momentum untuk melemahkan legitimasi rezim. Sebaliknya, kerusuhan memberikan dalih bagi penguasa untuk memperkuat represi melalui aparat keamanan, sekaligus menekan kembali ruang publik yang saat ini sudah menyusut.

Epilog

Pada intinya, kronik ini menawarkan koreksi: mengembalikan perlawanan sipil ke jalur yang lebih bermakna, yakni perjuangan tanpa kekerasan. Dalam kerangka itu, sasaran perlawanan sipil semestinya diarahkan pada ucapan, tindakan, dan kebijakan yang tidak bijaksana serta mengabaikan rasa keadilan sosial—baik oleh pemerintah, wakil rakyat, maupun aparat.

Dua gagasan besar dari tokoh perlawanan sipil, Mahatma Gandhi dan Martin Luther King, tetap relevan untuk membakar imajinasi gerakan hari ini. Satyagraha—kekuatan kebenaran—mengarahkan masyarakat sipil untuk selalu terbuka pada pencarian kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu mungkin justru hadir dari sudut pandang lawan. Sementara Ahimsa—non-kekerasan—bukan sekadar menolak menyakiti, tetapi juga membawa makna positif: ajakan untuk berbuat baik, bahkan kepada pelaku ketidakadilan.¹⁵ Dengan demikian, kekuatan kebenaran dan non-kekerasan menjadi energi moral bagi keberanian menegur serta mengoreksi setiap penyimpangan dari keadilan dalam semangat persaudaraan. Di situlah esensi sejati aksi sipil diteguhkan.

Bagi Martin Luther King Jr., non-kekerasan adalah jalan terbaik karena menawarkan solusi jangka panjang dan selaras dengan etika politik. Kekerasan, tegasnya, hanya menghadirkan kemenangan sementara. Sebaliknya, strategi non-kekerasan memuat visi radikal tentang keadilan sosial: revolusi nilai, bukan sekadar reformasi permukaan; perjuangan demi kemanusiaan, bukan kemenangan politik semata; dan komitmen terhadap cinta serta keadilan untuk melawan sistem yang dirusak oleh rasisme, keserakahan, dan kekerasan.¹⁶

Mengembalikan aksi sipil pada prinsip non-kekerasan menegaskan bahwa sikap ini bukan pasif, melainkan strategi aktif, kreatif, dan penuh inisiatif. Non-kekerasan menjadi bahan

¹⁴ Erica Chenoweth, *Civil resistance: What everyone needs to know*, (Oxford University Press, 2021)

¹⁵ Michael J. Nojeim “ Gandhi and King The Power of Nonviolent Resistance”, (Prager Publisher, 2004)

¹⁶ *Ibid*

bakar imajinasi untuk menghadapi ketidakadilan dengan keberanian tanpa senjata: mencegah kerusakan fisik yang ditimbulkan kekerasan, menjaga jiwa dari luka batin, serta berpegang pada keyakinan bahwa kekuatan semesta berpihak pada keadilan. Ia menuntun keberanian untuk menanggung penderitaan tanpa membalas, dengan keyakinan bahwa setiap usaha akhirnya akan berbuah hasil.

CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160

Tel: (62-21) 386 5532 | Fax: (6221) 384 7517 | csis.or.id

Please contact the editorial team for any enquiries at

publication@csis.or.id